

Realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan Capai Rp 4,425 triliun



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2023/03/d-2023-maret-2023-20-maret-2023-7-7-foto-hal-ekon-2.jpeg>

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengungkapkan realisasi belanja negara atau APBN di Provinsi Kalsel sampai 28 Februari 2023 mencapai Rp 4,425 triliun atau 14,15 persen dari pagu. “Secara total capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 38,42 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2022 lalu,” ujarnya pada media briefing perkembangan realisasi APBN Kalsel di Banjarmasin, Jumat (17/3).

Sulaimansyah mengakui untuk belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp734,26 miliar atau 9,14 persen atau naik sebesar 13,45 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp 647,24 miliar. Sedangkan untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Kalimantan Selatan sampai 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp3,690 triliun atau 15,88 persen dari pagu dan jika dibandingkan realisasi tahun yang lalu, lebih tinggi sebesar 44,76 persen.

Hal tersebut, kata Sulaimansyah, disebabkan oleh Pemda telah memenuhi dan mempercepat persyaratan penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) tahap I telah disalurkan pada tanggal 31 Januari 2023 bagi seluruh Pemda.

Selain itu, penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK

Nomor 37/KM.7/2022 dan PMK nomor 127/PMK.07/2022 pada TA 2022. Khusus untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap I 2023, telah tersalur untuk 1.015 desa dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) triwulan I telah diberikan kepada 758 desa.

Menyinggung realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sulaimansyah menyebutkan realisasi penyaluran KUR hingga Februari 2023 mencapai Rp150,19 milyar untuk 1.450 debitur. Penyaluran KUR tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 43,39 persen sebesar Rp65,17 miliar.

Sementara itu, realisasi penyaluran UMi di Kalsel per 28 Februari 2023 sebesar Rp2,26 miliar yang diberikan kepada 598 debitur. Penyaluran UMi tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 17,60 persen atau sebesar 397,9 juta kepada 114 debitur. Terkait pendapatan negara, Sulaimansyah menyebutkan realisasi pendapatan negara sampai dengan 28 Februari 2023 mencapai Rp3,881 triliun atau 20,95 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 96,59 persen.

Realisasi penerimaan perpajakan per 28 Februari 2023 telah mencapai Rp3,561 triliun atau 21,48 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp16,582 triliun. Realisasi penerimaan pajak itu tumbuh sebesar 109,01 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp164,32 miliar hingga 28 Februari 2023. Angka tersebut telah mencapai 33,01 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang berasal dari Penerimaan nasional bukan pajak (BNBP) di wilayah Kalimantan Selatan mencapai Rp320,25 miliar atau 16,43 persen dari target.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa pencairan bantuan langsung tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem 2023, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa setempat melalui Kelurahan dan Kecamatan. Pola pencairan bisa dilakukan setiap satu bulan sekali, di mana penerima akan mendapatkan Rp 300 ribu setiap bulan. Bisa juga dicairkan sekaligus maksimal setiap 3 bulan sekali, sehingga penerima BLT Kemiskinan Ekstrem akan mendapatkan uang sebesar Rp 900 ribu sekaligus.

Terkait jadwal kapan BLT Kemiskinan Ekstrem 2023 cair, Anda bisa langsung mendatangi kantor desa setempat untuk mengetahui jadwal pastinya. BLT Dana Desa dikeluarkan berlandarkan pada pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19 dengan alokasi mencapai 40 persen dari dana desa.

Untuk tahun 2023, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait BLT Dana Desa. Alokasi untuk bantuan ini dipangkas maksimal 25 persen dari pagu dana desa. Sasaran penerima BLT Dana Desa yaitu KPM yang tergolong Kemiskinan Ekstrem juga

diprioritaskan menyasar ke keluarga kategori miskin ekstrem. Sasaran ini tentu lebih spesifik dibandingkan pada program BLT Dana Desa tahun lalu yang diperuntukkan keluarga miskin dan kurang mampu. Sama seperti BLT Dana Desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan yang dianggarkan oleh kepala desa.

Jika ditotal secara keseluruhan, maka penerima BLT Dana Desa akan mendapatkan uang dari pemerintah sebesar Rp 3,6 juta selama satu tahun. Sebagai informasi penting bahwa pada tahun 2023 BLT Dana Desa diberikan merujuk pada amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Oleh sebab itu pada tahun 2023 program BLT Dana Desa disebut juga namanya Kemiskinan Ekstrem. Dengan BLT Dalam proses penetapan penerima BLT Kemiskinan Ekstrem, pihak desa akan menentukan keluarga kemiskinan ekstrem di desa tersebut. Jika di sebuah desa (kelurahan dan Kecamatan) tidak terdapat keluarga kategori kemiskinan ekstrem, maka akan dilihat ke 1-4 desa sekitarnya.

Apabila masih tidak terdapat keluarga kemiskinan ekstrem, selanjutnya penerima BLT Kemiskinan Ekstrem akan diberikan kepada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis, memiliki anggota rumah tangga tunggal lansia atau penderita difabel

Sumber Berita

1. <https://matabanua.co.id/2023/03/19/realisasi-belanja-negara-di-kalsel-capai-rp4425-triliun/>, Realisasi Belanja Negara di Kalsel Capai Rp 4.425 Triliun, (19/03/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/12/jumlah-yang-diterima-setiap-warga-dari-blt-dana-desa-2023-rp900-ribu-per-tiga-bulan>, Jumlah Yang Diterima Setiap Warga Dari BLT Dana Desa 2023, Rp 900 Ribu Per Tiga Bulan, (12/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.